

TAJUK RENCANA

Kritik Band Sukatani dan Polri

NAMA band Sukatani tiba-tiba muncul di berbagai media massa, termasuk media sosial. Ia menjadi menarik perhatian, usai lagu yang dibawakan "Bayar Bayar Bayar" ditarik dari peredaran dan mereka merilis video permintaan maaf. Tiba-tiba saja unggahan tersebut menjadi sorotan dan menuai reaksi keras netizen. Terlebih ketika demonstrasi mahasiswa merebak, mereka menyanyikan lagu tersebut. Maka wajar hingga banyak yang membela.

Band Sukatani berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah, yang dibentuk tahun 2022. Nama band ini diambil dari sebuah desa yang makam petaninya. Band beraliran post punk ini dimotori Muhammad Syifa Al Luthfi alias Alectroguy sebagai gitaris dan Novi Citra Indriyati atau Twister Angel vokalnya. Belakang warga juga baru tahu, jika Novi adalah seorang guru SD.

Sukatani fokus menyuarakan keresahan terkait situasi sosial, politik, dan lingkungan dalam lirik lagu-lagunya. Band ini punya aksi panggung yang unik. Mereka cenderung tampil menggunakan balaklava atau penutup kepala hingga leher dan jarang menunjukkan wajah mereka. Mereka sering kerap memulai penampilan dengan gimmick, seperti membagikan hasil bumi kepada penonton.

Ketika diduga melakukan penekanan pada Sukatani, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto, menegaskan kepolisian tidak antikritik dan tetap menghargai kebebasan berekspresi lewat seni. Ia juga mengakui pihaknya sempat memanggil personel Sukatani. Polisi memang sempat klarifikasi terhadap Band Sukatani tersebut sambil bicara santai. Hasil klarifikasi, polisi menghargai kegiatan berekspresi dan berpendapat melalui seni. Kemudian kritik atau pendapat dilantunkan melalui seni tersebut. Bahkan klarifikasi yang dilakukan sekadar ngobrol santai antara penyidik Siber Polda Jateng dan personel Sukatani. Jadi sama sekali tak meminta band tersebut untuk bikin

video permintaan maaf.

Bahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak band punk Sukatani untuk menjadi duta Polri, untuk perbaikan institusi serta mencegah terjadinya perilaku menyimpang seluruh personel. Sigit berharap band Sukatani berkenan dijadikan duta atau juri untuk institusi Polri.

Menurut Kapolri, hal itu adalah bagian dari komitmen Polri untuk terus berbenah menjadi organisasi yang bisa betul-betul adaptif menerima koreksi, untuk bisa menjadi organisasi modern yang terus melakukan perubahan dan perbaikan menjadi lebih baik.

Kita melihat, pernyataan tersebut adalah bagian dari reformasi Polri yang terus berbenah. Sikap Polri dalam menerima kritik adalah hal yang sangat penting, untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mewujudkan Polri yang lebih baik.

Secara umum, Polri menyatakan terbuka terhadap kritik yang membangun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Polri mengakui bahwa kritik dari masyarakat, media, dan lembaga pengawas lainnya penting untuk mengidentifikasi kekurangan dan area yang perlu diperbaiki.

Namun, sikap terhadap kritik dapat bervariasi tergantung pada sifat kritik itu sendiri. Kritik yang konstruktif, berdasarkan fakta, dan disampaikan dengan cara yang sopan cenderung diterima dengan baik dan ditindaklanjuti. Di sisi lain, kritik yang bersifat asal menyerang, tidak berdasar fakta, atau mengandung ujaran kebencian tentu tidak ditanggapi dengan cara yang sama.

Semua institusi memang harus meningkatkan reformasi birokrasi untuk menciptakan organisasi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain akan sangat bijak untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal guna memastikan bahwa lembaganya bekerja sesuai dengan aturan. (***)f



POLEMIK mengenai loyalitas kepala daerah (Kepda) mengemuka saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno-puteri menginstruksikan kader PDIP yang men-

jadi Gubernur/walikota/Bupati untuk menunda mengikuti retreat beberapa waktu lalu. Akhirnya puluhan Kepda yang kader PDIP terlambat atau bahkan mungkin tidak mengikuti kegiatan orientasi kepemimpinan.

Banyak pemerhati politik dan Hukum Tata Negara menyayangkan instruksi ketua umum PDIP tentang retreat yang disebut sebagai keputusan tidak menggambarkan sikap kene-garawan. Sebab seseorang setelah dilantik menjadi kepala daerah, maka menjadi bagian dari sistem pemerintahan Republik Indonesia. Kepda mengabdikan pada masyarakat di daerah dan loyal pada kebijakan pemerintah pusat dalam bingkai NKRI.

Dalam relasi hubungan pusat-daerah, Kepda wajib melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diamanatkan dalam UU No 23 Tahun 2014. Kepda memimpin pemerintahan di daerah yang tugas pokoknya menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib pemerintahan di daerah pembiayaannya dari transfer pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus.

Dalam posisi sosiologis pemerintahan kepala daerah, khususnya Bupati/ Walikota adalah ibawahanikepala pemerintahan RI, yakni Presiden. Wajib tunduk dan taat pada kebijakan presiden yang tertuang dalam dokumen RPJMNasional maupun RPJP yang merupakan haluan program pembangunan nasional. Program pemerintah daerah baik yang tertuang dalam RPJMD maupun turunnya RKPD harus itegak lurus pada orientasi visi misi dan program pemerintah pusat.

Sistem pemerintahan Indonesia jelas menganut asas presidensiil dengan membagi tugas pemerintahan pada tugas pokok pemerintah pusat dan tugas pemerintah daerah. Ada korelasi, ada koordinasi dan harusnya ada sinergi. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah juga diatur dalam standar pelayanan minimal yang juknisnya ditetapkan oleh Kemen-dagri. Demikian format Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LP-PD) ditentukan melalui peraturan pemerintah sebagai pelaksana UU no 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Konstruksi kewenangan dan otoritas pemerintah daerah adalah pada nalar otonomi daerah yang bertanggungjawab.

Trisno Yulianto

Kepemimpinan daerah dinilai atau dievaluasi oleh pemerintah pusat, yakni melalui monitoring dan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Konteks demikian Kepda harus loyal pada pemerintah pusat dan kepala pemerintahan, yakni Presiden. Tidak boleh *mbalelo* dan tidak boleh membangkang (*disobidence*).

Lantas bagaimanakah Kepda yang merupakan kader inti partai politik. Tentu ketika telah menjabat Kepda harus loyal pada pemerintah pusat. Loyalitas pada partai politik bersifat personal, bukan impersonal yang aktualisasinya ditentukan oleh pemenuhan harapan partai politik



KR-JOKO SANTOSO

terhadap program kegiatan yang dijalankan pemerintah daerah. Meski demikian ada rambu-rambu regulasi yang harus ditaati dan dipedomani Kepda ketika memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Loyalitas kepada pemerintah pusat adalah mandat konstitusi. Pemerintah daerah adalah bagian dari sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah daerah bukan daerah iperdikaniyang bisa membuat kebijakan atau keputusan program yang melenceng jauh dari arahan pemerintah pusat. Apalagi pemerintah daerah sangat tergantung sumber anggaran dari APBN. Dari 508 Kabupaten/Kota di 38 Provinsi hanya 11,2 % pemerintah daerah yang memiliki PAD yang layak untuk disebut mandiri. Mayoritas masih tergantung dari dana transfer pusat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan (urusan wajib dan urusan pilihan).

Loyalitas Kepda dibedakan menjadi loyalitas politik, loyalitas ideologi dan loyalitas birokratik. Loyalitas politik adalah kepatuhan dan ketaatan melaksanakan program dan kebijakan presiden

(pemerintah pusat). Loyalitas ideologi adalah kesetiaan pada konstitusi, yakni Pancasila dan UUD 1945. Tidak boleh mengkhianati ideologi negara.

Sedang loyalitas birokratik adalah melaksanakan tindakan membangun yang dimandatkan UU dan menjadi kebijakan pemerintah pusat. Wajib mengonsolidasi tugas dan fungsi birokrasi pemerintahan daerah untuk menyukseskan program program strategis nasional.

Jadi alangkah ironi, jika ada ketua umum partai politik atau partai politik mengarahkan tindakan membangun, insubordinasi dan tidak patuh kepala daerah terhadap instruksi kebijakan presiden atau pemerintah pusat. Ketua umum partai dan partai politik harus memahami substansi hukum tata negara, bahwa pemerintah daerah merupakan satu kesatuan dalam bingkai negara kesatuan.

Kepda dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah wajib memiliki kesetiaan tunggal (monoloyalitas) pada presiden sebagai kepala pemerintahan. Monoloyalitas yang tidak bisa ditawarkan dengan negoisasi politik kepentingan subjektif atau politik partisan. Monoloyalitas Kepda bagian dari integrasi kepemimpinan dan juga soliditas pemerintahan untuk mewujudkan cita cita konstitusional. Cita-cita mulia yang merupakan mandat ideologis dari *the founding fathers*.

Monoloyalitas Kepda adalah bentuk penghormatan kepada kepemimpinan nasional dalam rangka mengerakkan program kegiatan yang memiliki tujuan menyejahterakan masyarakat. Tugas partai politik melalui wakilnya di parlemen pusat-daerah adalah mengawasi, mengkritisi dan melakukan kontrol.

Monoloyalitas Kepda adalah kunci bagi sinergitas pemerintahan pusat-daerah dalam mewujudkan program-program ekonomi politik yang pro masyarakat dan menuju tata kelola pemerintahan yang *good governance*.(*)

*)**Trisno Yulianto**, Koordinator Forum Kajian Demokrasi Deliberasi.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso Ssn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.

Wartawan : H Ishaq Zubaidi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Rotaenga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Nyadran sebagai Kearifan Lokal



TERLEPAS dari pro kontra di tengah masyarakat yang majemuk dan kian rasional, kegiatan tradisi ritual budaya Nyadran di bulan Syaiban atau Ruwah menjelang

Ramadan ini masih tetap dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Jawa pada umumnya dan DIY khususnya. Nyadran atau apapun namanya seperti Ruwah, Unggahan, Megengan atau lainnya, dimaksudkan untuk mendoakan arwah orangtua dan para leluhur yang telah meninggal dunia serta sarana rohani membersihkan diri untuk persiapan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan.

Kegiatan ini bisa dilakukan secara pribadi juga secara bersama-sama dalam satu komunitas di tingkat RT, dusun bahkan kalurahan. Ada yang dilakukan secara sederhana tetapi ada juga yang dikemas sedemikian rupa dengan berbagai seremonialnya sampai menjadi sebuah even wisata. Memang tidak atau belum ada data yang menunjukkan sejak kapan awal kegiatan Nyadran dilaksanakan. Namun diyakini sebagai proses akulturasi budaya antara Jawa dengan agama Budha, Hindu, dan Islam. Hingga tercipta harmonisasi dalam kehidupan masyarakat tanpa saling merendahkan apalagi menghilangkannya. Apakah kegiatan Nyadran sebagai kearifan lokal masih perlu dilaksanakan.

Silaturahmi

Dengan kian pesatnya teknologi informasi komunikasi melalui berbagai aplikasi, termasuk media sosial, mampu menghilangkan sekat berupa jarak, ruang dan waktu antarsesama dan telah mengurangi interaksi sosial secara langsung. Maka Nyadran sebagai salah satu tradisi ritual kemasyarakatan, menjadi sarana untuk menjalin silaturahmi antara warga satu dengan lainnya tanpa memandang agama dan kepercayaan apapun. Meski doa-doa yang diucapkan banyak menggu-

Bambang Nugroho

nakan bahasa Arab, karena dipimpin oleh seorang modin atau kaum rois yang beragama Islam, namun hal itu tidak menjadi hambatan untuk saling berkumpul dengan tujuan yang sama walau berbeda agama dan kepercayaan.

Nyadran lebih nampak banyak dilaksanakan oleh masyarakat pedesaan dibandingkan perkotaan, karena memang masyarakat pedesaan memiliki ikatan sosial lebih kuat oleh latar belakang kedekatan keluarga melalui hubungan darah dibanding masyarakat kota yang lebih majemuk. Namun desa-desa saat ini juga telah banyak yang memiliki ciri-ciri masyarakat perkotaan seperti pemukiman makin padat, banyak kompleks perumahan, banyak warga pendatang sehingga antarwarga juga sudah tidak saling mengenal satu sama lain.

Selama para pendatang mau berbaur dengan warga setempat, kegiatan Nyadran tentu masih akan bisa berlangsung, tentu saja dengan berbagai modifikasinya sesuai kondisi yang ada. Namun sebaliknya kegiatan Nyadran akan hilang sebagai salah satu sarana silaturahmi antarwarga, bila masyarakat setempat yang sudah semakin heterogen serta tidak ada ikatan keluarga satu dengan lainnya termasuk dengan para leluhur yang ada disitu, hingga Nyadran dipandang sudah tidak perlu dilakukan lagi.

Kearifan Lokal

Sebagai salah satu tradisi yang memiliki nilai kearifan lokal, kegiatan Nyadran bisa menjadi modal sosial yang sangat berharga, dalam bersama-sama membangun masyarakat agar lebih memiliki jiwa sosial

atau kepedulian terhadap pihak lain. Mengingat berbagai macam tuntutan kehidupan yang kian kompleks saat ini, masyarakat cenderung egois dan materialistik hingga mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai sosial terutama nilai saling tolong-menolong secara ikhlas. Karena segala aktivitas senantiasa dihitung secara ekonomis, untung rugi, dapat upah atau tidak.

Agar kegiatan Nyadran tidak hilang, sebagai wujud dari salah satu kebudayaan tak benda yang memiliki nilai kearifan lokal, perlu diambil beberapa langkah, antara lain. Pertama, penyampaian sosialisasi akan arti penting Nyadran bagi kehidupan bermasyarakat oleh para tokoh pemuksa setempat. Kedua, melebarkan kegiatan Nyadran dengan membentuk kepengurusan secara tetap melalui masa bakti pada periode tertentu di setiap RT, dusun atau lingkungan dalam lingkup yang kecil. Ketiga, ada apresiasi dari pemerintah kepada pelaksana kegiatan Nyadran apapun bentuknya hingga menambah khasanah terhadap keistimewaan Yogyakarta. (*)

*)**Bambang Nugroho**, Ketua Paguyuban Sastrawan Jawa Bantul (PSJB) 'Pamarta'.

Pojok KR

Presiden : Turunkan harga sembako.
- Sikat tengkulak yang suka mempermainkan harga.

Danantara tak kebal hukum.
- Kelola Rp 300 T memang bisa menggoda.

Menag minta, Saudi tak batasi usia Jemaah Haji.
- Daftar tunggu Indonesia kian banyak.

Berabe